



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 76 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARWANGI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARWANGI TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 76**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN BANJARWANGI
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui usutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

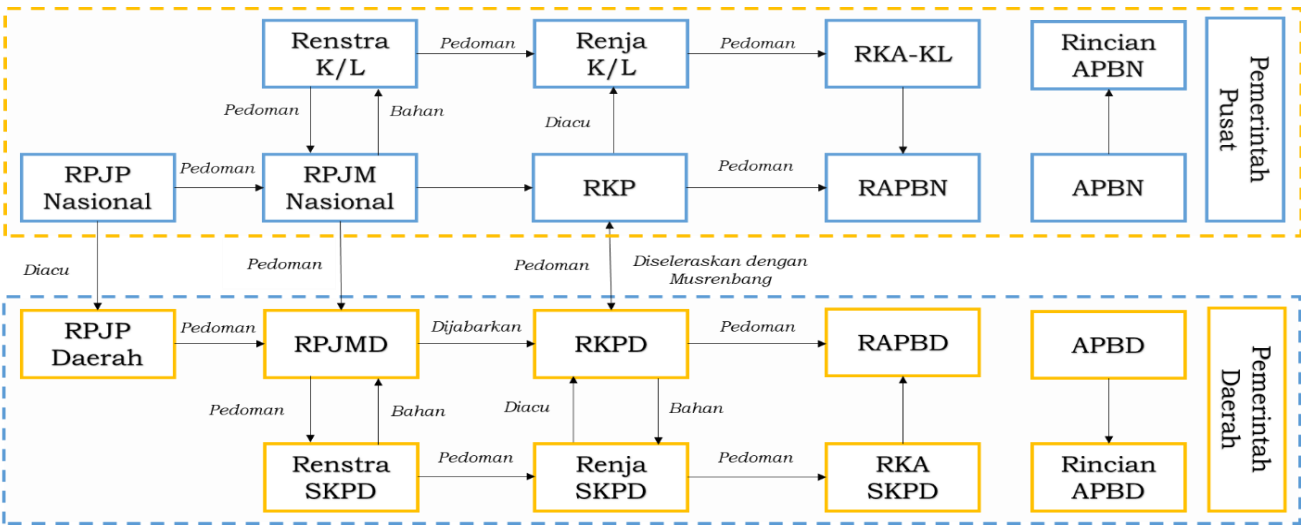
Renja SKPD/Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja perumusan rancangan akhir Renja

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.1
Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

Renja SKPD/Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja SKPD/ Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

bahwa Renja SKPD/ Kecamatan Banjarwangi merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

- 1 Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), , dan tepat waktu (*Time*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan,

agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/ Kecamatan Banjarwangi Banjarwangi Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Selanjutnya pada tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut Menitik beratkan pada Tema Pembangunan tahun 2023 yaitu” **Peningkatan Pelayanan Publik , Pemetaan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat** dengan sasaran :

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan

13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Banjarwangi tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Renja SKPD/ Kecamatan Banjarwangi adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Renja SKPD/ Kecamatan Banjarwangi guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjarwangi tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Banjarwangi Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjarwangi tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Banjarwangi sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjarwangi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarwangi selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjarwangi Tahun 2021 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2) Pengadaan Meubeulair
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- 5) Penataan Halaman Gedung/Kantor

3. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :

- 1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
- 2) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
- 3) Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
- 5) Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
- 6) Penyusunan RPTK Kecamatan
- 7) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
- 8) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
- 9) Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan
- 10) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna
- 11) Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi tahun 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 22 Kegiatan terdapat 9 (sembilan) Kegiatan (33,33%) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (79,31%)
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (75,85)
3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (99,30%)
4. Kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan Kedalam Daerah (99,97%)
5. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (96,56%)
6. Kegiatan Pengadaan Meubeulair (99,76%)
7. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (99,60%)
8. Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor (95,05%)
9. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (90,03%)

Realisasi Program /Kegiatan pada table 1.2 sebagai berikut :

Table. 1.2

Realisasi Program /Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang di rencanakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN	
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.418.130.860,00	1.301.543.446,00	(1.116.587.414,00)	53,82
7.01.7.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.418.130.860,00	1.301.543.446,00	(1.116.587.414,00)	53,82
7.01.7.01.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.968.188.860,00	1.115.698.446,00	(852.490.414,00)	56,69
7.01.7.01.01.01.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.785.000,00	4.892.500,00	(4.892.500,00)	50,00
7.01.7.01.01.01.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.785.000,00	4.892.500,00	(4.892.500,00)	50,00
7.01.7.01.01.01.01.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	9.785.000,00	4.892.500,00	(4.892.500,00)	50,00
7.01.7.01.01.01.01.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	9.785.000,00	4.892.500,00	(4.892.500,00)	50,00
7.01.7.01.01.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.385.000,00	692.500,00	(692.500,00)	50,00
7.01.7.01.01.01.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	50,00
7.01.7.01.01.01.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.409.730.860,00	846.917.196,00	(562.813.664,00)	60,08
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.409.730.860,00	846.917.196,00	(562.813.664,00)	60,08
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	845.747.955,00	516.810.599,00	(328.937.356,00)	61,11
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	561.249.819,00	352.111.800,00	(209.138.019,00)	62,74
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	561.249.819,00	352.111.800,00	(209.138.019,00)	62,74
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	94.813.751,00	47.989.968,00	(46.823.783,00)	50,61
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	94.813.751,00	47.989.968,00	(46.823.783,00)	50,61
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82.880.000,00	58.120.000,00	(24.760.000,00)	70,13
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82.880.000,00	58.120.000,00	(24.760.000,00)	70,13
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.166.000,00	1.800.000,00	(3.366.000,00)	34,84
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.166.000,00	1.800.000,00	(3.366.000,00)	34,84

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN	
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	39.193.704,00	27.085.080,00	(12.108.624,00)	69,11
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	39.193.704,00	27.085.080,00	(12.108.624,00)	69,11
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	560.000,00	245.885,00	(314.115,00)	43,91
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	560.000,00	245.885,00	(314.115,00)	43,91
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.562,00	4.620,00	(2.942,00)	61,09
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.562,00	4.620,00	(2.942,00)	61,09
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	54.332.069,00	26.761.554,00	(27.570.515,00)	49,26
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.332.069,00	26.761.554,00	(27.570.515,00)	49,26
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.886.262,00	672.924,00	(1.213.338,00)	35,68
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.886.262,00	672.924,00	(1.213.338,00)	35,68
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.658.788,00	2.018.768,00	(3.640.020,00)	35,67
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.658.788,00	2.018.768,00	(3.640.020,00)	35,67
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	563.982.905,00	330.106.597,00	(233.876.308,00)	58,53
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	563.982.905,00	330.106.597,00	(233.876.308,00)	58,53
7.01.7.01.01.01.02.01.5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	563.982.905,00	330.106.597,00	(233.876.308,00)	58,53
7.01.7.01.01.01.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	12.111.000,00	0,00	(12.111.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.111.000,00	0,00	(12.111.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.02.05.5.1.02.01.	Belanja Barang	5.511.000,00	0,00	(5.511.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.02.05.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.511.000,00	0,00	(5.511.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.02.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	711.000,00	0,00	(711.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.02.05.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.02.05.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.02.05.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.02.05.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	18.768.500,00	18.760.000,00	(8.500,00)	99,95
7.01.7.01.01.01.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.768.500,00	18.760.000,00	(8.500,00)	99,95

7.01.7.01.01.01.05.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	18.768.500,00	18.760.000,00	(8.500,00)	99,95
7.01.7.01.01.01.05.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	18.768.500,00	18.760.000,00	(8.500,00)	99,95
7.01.7.01.01.01.05.02.5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.808.000,00	6.800.000,00	(8.000,00)	99,88

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN	
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.01.01.05.02.5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.424.200,00	9.424.000,00	(200,00)	100,00
7.01.7.01.01.01.05.02.5.1.02.01.01.0073.	Belanja Pakaian KORPRI	2.536.300,00	2.536.000,00	(300,00)	99,99
7.01.7.01.01.01.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKANTUGAS DAN FUNGSI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.05.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.05.09.5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.05.09.5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.05.09.5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.06.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.06.01.5.1.02.01.0001.	Belanja Barang Pakai Habis	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.06.01.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	104.538.800,00	13.243.750,00	(91.295.050,00)	12,67
7.01.7.01.01.01.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.198.300,00	13.243.750,00	(17.954.550,00)	42,45
7.01.7.01.01.01.06.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	31.198.300,00	13.243.750,00	(17.954.550,00)	42,45
7.01.7.01.01.01.06.02.5.1.02.01.0001.	Belanja Barang Pakai Habis	31.198.300,00	13.243.750,00	(17.954.550,00)	42,45
7.01.7.01.01.01.06.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	31.198.300,00	13.243.750,00	(17.954.550,00)	42,45
7.01.7.01.01.01.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.340.500,00	0,00	(73.340.500,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.06.02.5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.404.000,00	0,00	(22.404.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.06.02.5.2.02.06.0001.	Belanja Modal Alat Studio	22.404.000,00	0,00	(22.404.000,00)	0,00

7.01.7.01.01.01.06.02.5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	22.404.000,00	0,00	(22.404.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.06.02.5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	50.936.500,00	0,00	(50.936.500,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.06.02.5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	50.936.500,00	0,00	(50.936.500,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.06.02.5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	50.936.500,00	0,00	(50.936.500,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.461.000,00	2.000.000,00	(2.461.000,00)	44,83
7.01.7.01.01.01.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.461.000,00	2.000.000,00	(2.461.000,00)	44,83
7.01.7.01.01.01.06.05.5.1.02.01.	Belanja Barang	4.461.000,00	2.000.000,00	(2.461.000,00)	44,83
7.01.7.01.01.01.06.05.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.461.000,00	2.000.000,00	(2.461.000,00)	44,83
7.01.7.01.01.01.06.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.461.000,00	2.000.000,00	(2.461.000,00)	44,83

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN	
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	R p .	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.01.01.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	14.400.000,00	8.400.000,00	(6.000.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.01.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	8.400.000,00	(6.000.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.01.06.08.5.1.02.01.	Belanja Barang	14.400.000,00	8.400.000,00	(6.000.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.01.06.08.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	14.400.000,00	8.400.000,00	(6.000.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.01.06.08.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman JamuanTamu	14.400.000,00	8.400.000,00	(6.000.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.01.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	31.590.000,00	13.550.000,00	(18.040.000,00)	42,89
7.01.7.01.01.01.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.590.000,00	13.550.000,00	(18.040.000,00)	42,89
7.01.7.01.01.01.06.09.5.1.02.01.	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.06.09.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.06.09.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.06.09.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	31.440.000,00	13.400.000,00	(18.040.000,00)	42,62
7.01.7.01.01.01.06.09.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.440.000,00	13.400.000,00	(18.040.000,00)	42,62
7.01.7.01.01.01.06.09.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.440.000,00	13.400.000,00	(18.040.000,00)	42,62
7.01.7.01.01.01.07.01.	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	74.884.000,00	70.300.000,00	(4.584.000,00)	93,88
7.01.7.01.01.01.07.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.884.000,00	70.300.000,00	(4.584.000,00)	93,88

7.01.7.01.01.01.07.01.5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	74.884.000,00	70.300.000,00	(4.584.000,00)	93,88
7.01.7.01.01.01.07.01.5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	74.884.000,00	70.300.000,00	(4.584.000,00)	93,88
7.01.7.01.01.01.07.01.5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	74.884.000,00	70.300.000,00	(4.584.000,00)	93,88
7.01.7.01.01.01.07.05.	PENGADAAN MEBEL	91.392.500,00	88.495.000,00	(2.897.500,00)	96,83
7.01.7.01.01.01.07.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	741.000,00	0,00	(741.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.07.05.5.1.02.01.	Belanja Barang	741.000,00	0,00	(741.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.07.05.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	741.000,00	0,00	(741.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.07.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	741.000,00	0,00	(741.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.651.500,00	88.495.000,00	(2.156.500,00)	97,62
7.01.7.01.01.01.07.05.5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan RumahTangga	90.651.500,00	88.495.000,00	(2.156.500,00)	97,62
7.01.7.01.01.01.07.05.5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	90.651.500,00	88.495.000,00	(2.156.500,00)	97,62
7.01.7.01.01.01.07.05.5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	70.399.000,00	68.475.000,00	(1.924.000,00)	97,27
7.01.7.01.01.01.07.05.5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	15.744.000,00	15.620.000,00	(124.000,00)	99,21
7.01.7.01.01.01.07.05.5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.508.500,00	4.400.000,00	(108.500,00)	97,59

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN	
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	R p .	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.01.01.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.310.200,00	5.770.000,00	(4.540.200,00)	55,96
7.01.7.01.01.01.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.310.200,00	5.770.000,00	(4.540.200,00)	55,96
7.01.7.01.01.01.08.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.310.200,00	5.770.000,00	(4.540.200,00)	55,96
7.01.7.01.01.01.08.02.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	10.310.200,00	5.770.000,00	(4.540.200,00)	55,96
7.01.7.01.01.01.08.02.5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	10.310.200,00	5.770.000,00	(4.540.200,00)	55,96
7.01.7.01.01.01.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.870.000,00	0,00	(7.870.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.870.000,00	0,00	(7.870.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.08.03.5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	7.870.000,00	0,00	(7.870.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.08.03.5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.870.000,00	0,00	(7.870.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.08.03.5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000,00	0,00	(5.110.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.08.03.5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-PeralatanKomputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000,00	0,00	(2.760.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	11.000.000,00	7.750.000,00	(3.250.000,00)	70,45

7.01.7.01.01.01.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	7.750.000,00	(3.250.000,00)	70,45
7.01.7.01.01.01.08.04.5.1.02.01.	Belanja Barang	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.08.04.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.08.04.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.08.04.5.1.02.02.	Belanja Jasa	7.800.000,00	4.550.000,00	(3.250.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.01.08.04.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	4.550.000,00	(3.250.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.01.08.04.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.800.000,00	4.550.000,00	(3.250.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.01.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAA	20.442.000,00	12.440.000,00	(8.002.000,00)	60,86
7.01.7.01.01.01.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.442.000,00	12.440.000,00	(2.000,00)	99,98
7.01.7.01.01.01.09.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	2.682.000,00	2.680.000,00	(2.000,00)	99,93
7.01.7.01.01.01.09.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.682.000,00	2.680.000,00	(2.000,00)	99,93
7.01.7.01.01.01.09.01.5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.682.000,00	2.680.000,00	(2.000,00)	99,93
7.01.7.01.01.01.09.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.09.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.09.01.5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.09.01.5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.09.01.5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN	
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	R p .	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.01.01.09.01.5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor Perorangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.09.01.5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.09.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.09.01.5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.09.01.5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.09.01.5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel BermesinLainnya	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	128.705.000,00	14.980.000,00	(113.725.000,00)	11,64
7.01.7.01.01.01.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00

7.01.7.01.01.01.09.09.5.1.02.01.	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.09.09.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.09.09.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.01.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.405.000,00	14.680.000,00	(113.725.000,00)	11,43
7.01.7.01.01.01.09.09.5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	128.405.000,00	14.680.000,00	(113.725.000,00)	11,43
7.01.7.01.01.01.09.09.5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung TempatKerja	113.724.000,00	0,00	(113.724.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.09.09.5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	113.724.000,00	0,00	(113.724.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.01.09.09.5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	14.681.000,00	14.680.000,00	(1.000,00)	99,99
7.01.7.01.01.01.09.09.5.2.03.01.02.0001.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	14.681.000,00	14.680.000,00	(1.000,00)	99,99
7.01.7.01.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	193.887.000,00	62.000.000,00	(131.887.000,00)	31,98
7.01.7.01.01.02.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	173.487.000,00	50.100.000,00	(123.387.000,00)	28,88
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	128.702.000,00	37.650.000,00	(91.052.000,00)	29,25
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	97.822.000,00	26.850.000,00	(70.972.000,00)	27,45
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	97.822.000,00	26.850.000,00	(70.972.000,00)	27,45
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	9.251.000,00	9.250.000,00	(1.000,00)	99,99
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.099.000,00	350.000,00	(3.749.000,00)	8,54
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	716.000,00	0,00	(716.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.128.000,00	11.000.000,00	(8.128.000,00)	57,51
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman JamuanTamud	26.860.000,00	2.650.000,00	(24.210.000,00)	9,87
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.01.01.0071.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	13.468.000,00	0,00	(13.468.000,00)	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN	
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	R p .	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	20.700.000,00	0,00	(20.700.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	560.000,00	0,00	(560.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	560.000,00	0,00	(560.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	560.000,00	0,00	(560.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	30.320.000,00	10.800.000,00	(19.520.000,00)	35,62

7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.320.000,00	10.800.000,00	(19.520.000,00)	35,62
7.01.7.01.01.02.01.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.320.000,00	10.800.000,00	(19.520.000,00)	35,62
7.01.7.01.01.02.01.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.785.000,00	12.450.000,00	(32.335.000,00)	27,80
7.01.7.01.01.02.01.02.5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	32.335.000,00	0,00	(32.335.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.02.01.02.5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	32.335.000,00	0,00	(32.335.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.02.01.02.5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	32.335.000,00	0,00	(32.335.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.02.01.02.5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.02.01.02.5.2.02.08.09.	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.02.01.02.5.2.02.08.09.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanandan Suhu	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.02.02.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	20.400.000,00	11.900.000,00	(8.500.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.02.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	11.900.000,00	(8.500.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.02.02.03.5.1.02.02.	Belanja Jasa	20.400.000,00	11.900.000,00	(8.500.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.02.02.03.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	11.900.000,00	(8.500.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.02.02.03.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.400.000,00	11.900.000,00	(8.500.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.435.000,00	15.695.000,00	(22.740.000,00)	40,84
7.01.7.01.01.03.01.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	6.735.000,00	3.335.000,00	(3.400.000,00)	49,52
7.01.7.01.01.03.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.735.000,00	3.335.000,00	(3.400.000,00)	49,52
7.01.7.01.01.03.01.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.03.01.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.03.01.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman JamuanTamu	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.01.03.01.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.03.01.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.03.01.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.03.01.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00

KODE REKENING	URAIA N	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN	
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	R p .	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.01.03.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.03.01.03.5.1.02.01.	Belanja Barang	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00

7.01.7.01.01.03.01.03.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.03.01.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.290.000,00	0,00	(1.290.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.03.01.03.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman JamuanTamu	6.710.000,00	0,00	(6.710.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.03.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	23.700.000,00	12.360.000,00	(11.340.000,00)	52,15
7.01.7.01.01.03.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	12.360.000,00	(11.340.000,00)	52,15
7.01.7.01.01.03.03.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	7.500.000,00	3.125.000,00	(4.375.000,00)	41,67
7.01.7.01.01.03.03.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	3.125.000,00	(4.375.000,00)	41,67
7.01.7.01.01.03.03.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.500.000,00	625.000,00	(875.000,00)	41,67
7.01.7.01.01.03.03.02.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman JamuanTamu	6.000.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	41,67
7.01.7.01.01.03.03.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	16.200.000,00	9.235.000,00	(6.965.000,00)	57,01
7.01.7.01.01.03.03.02.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	9.235.000,00	(6.965.000,00)	57,01
7.01.7.01.01.03.03.02.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	9.235.000,00	(6.965.000,00)	57,01
7.01.7.01.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	91.220.000,00	45.250.000,00	(45.970.000,00)	49,61
7.01.7.01.01.04.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL	91.220.000,00	45.250.000,00	(45.970.000,00)	49,61
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.220.000,00	45.250.000,00	(45.970.000,00)	49,61
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	10.580.000,00	0,00	(10.580.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	10.580.000,00	0,00	(10.580.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	580.000,00	0,00	(580.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman JamuanTamu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	78.000.000,00	45.250.000,00	(32.750.000,00)	58,01
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	77.400.000,00	45.150.000,00	(32.250.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman,Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	77.400.000,00	45.150.000,00	(32.250.000,00)	58,33
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	16,67
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	16,67
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.04.01.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	0,00
KODE REKENING	URAIA N	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN	
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	R p	%

				.	
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.000.000,00	62.900.000,00	(37.100.000,00)	62,90
7.01.7.01.01.05.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	100.000.000,00	62.900.000,00	(37.100.000,00)	62,90
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	62.900.000,00	(37.100.000,00)	62,90
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.01.	Belanja Barang	11.200.000,00	5.600.000,00	(5.600.000,00)	50,00
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	11.200.000,00	5.600.000,00	(5.600.000,00)	50,00
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.000.000,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	50,00
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.02.	Belanja Jasa	58.300.000,00	43.725.000,00	(14.575.000,00)	75,00
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	58.300.000,00	43.725.000,00	(14.575.000,00)	75,00
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.800.000,00	6.600.000,00	(2.200.000,00)	75,00
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	37.125.000,00	(12.375.000,00)	75,00
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	30.500.000,00	13.575.000,00	(16.925.000,00)	44,51
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.500.000,00	13.575.000,00	(16.925.000,00)	44,51
7.01.7.01.01.05.01.08.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.500.000,00	13.575.000,00	(16.925.000,00)	44,51
7.01.7.01.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.04.	FASILITASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN	11.750.000,00	0,00	(11.750.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	0,00	(11.750.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.04.5.1.02.01.	Belanja Barang	6.350.000,00	0,00	(6.350.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.04.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.350.000,00	0,00	(6.350.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.04.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.04.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.04.5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.04.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.04.5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman,Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.16.	FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	14.650.000,00	0,00	(14.650.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	0,00	(14.650.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.16.5.1.02.01.	Belanja Barang	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.16.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.16.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN	
		Anggaran Sebelum Perubahan	REALISASI	R p .	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.01.06.01.16.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman JamuanTamu	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.16.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.16.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	0,00
7.01.7.01.01.06.01.16.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	0,00

valisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 22 Kegiatan terdapat 18 (delapan belas) Kegiatan (66,67%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9. Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
10. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
11. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan
12. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
13. Kegiatan Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
14. Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan
15. Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
16. Kegiatan Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan
17. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna
18. Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
 - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
 - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Banjarwangi pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Banjarwangi
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Banjarwangi merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Banjarwangi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

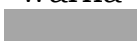


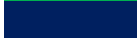
Adapun capaian Renstra Kecamatan Banjarwangi tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	Triwulan 1				
						Triwulan 2	85	82.58	71.01	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	85	82.75	71.01	
						Kondisi Akhir (F)		82.75	71.01	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	CC	CC	66	
						Kondisi Akhir (F)		CC	66	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Banjarwangi 2022

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

- Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :
- Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Banjarwangi tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
 - Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakip kecamatan.
 - Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100, 93%.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Banjarwangi Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel. 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banjarwangi

Lembar :.....

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						3,215,814,138									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,414,639,933							2,669,205,838		
7	01	01	2.02		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32,605,556							35,844,111		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	20,020,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		6 Dokumen	22,000,000	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	12,585,556	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		2 Laporan	13,844,111	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	01	2.03		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,655,465,436							1,821,011,979	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	1,640,465,436	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		9 Orang/bulan	1,804,511,979	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,000,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Laporan	16,500,000	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	01	2.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20,737,500							22,811,250	Kecamatan Banjarwangi	

7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	5,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		20 Paket	6,160,000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	15,137,500	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		3 Orang	16,651,250	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						532,681,336							594,468,384	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,420,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Paket	14,762,000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Paket	275,000,000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9,680,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Paket	10,648,000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	16,137,986	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		12 Paket	17,751,784	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10,460,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		12 DokumeN	11,446,600	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	72,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		12 Laporan	79,860,000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	142,000,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		12 Laporan	165,000,000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penyediaan Arsip di Kecamatan				1 Laporan	18,437,350	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	012.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						82,491,255							90,740,380	

7	01	01 2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	82,491,255	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		3 Unit	90,740,380	Kecamatan Banjarwangi
7	01	012.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43,975,951							47,973,546	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01 2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	14,000,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Tahun	15,000,000	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01 2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25,000,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Laporan	12,567,500	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01 2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	18,550,951	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Laporan	20,406,046	Kecamatan Banjarwangi
7	01	012.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					46,682,899							56,356,188	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01 2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	7,560,200	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		10 Unit	8,316,220	Kecamatan Banjarwangi
7	01	01 2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 gedung	39,122,699	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		2 gedung	48,039,968	Kecamatan Banjarwangi
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						206,893,287							227,582,614	
7	01	022.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					191,648,799							210,813,678	
7	01	02 2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5 Dokumen	191,648,799	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	PENDAPATAN TRANSFER		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		5 Dokumen	210,813,678	Kecamatan Banjarwangi

7	01	022.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					15,244,488								16,768,936	Kecamatan Banjarwangi
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				4 Dokumen		15,244,488	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		4 Dokumen		16,768,936	Kecamatan Banjarwangi
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						86,830,005								73,975,027	Kecamatan Banjarwangi
7	01	032.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						36,830,005								18,975,027	Kecamatan Banjarwangi
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						19,580,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			22,000,000	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan			12 Laporan		17,250,005	Kab. Garut, Caringin,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja		12 Laporan	18,975,005	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						50,000,000							Kecamatan Banjarwangi		
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			1 Dokumen		50,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Dokumen	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						293,938,819							Kecamatan Banjarwangi		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						238,813,819							Kecamatan Banjarwangi		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan		188,813,819	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		12 Laporan	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1 Laporan		50,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Laporan	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi	

7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					55,125,000							Kecamatan Banjarwangi	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			12 Laporan	55,125,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		12 Laporan	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					130,250,000							Kecamatan Banjarwangi	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					130,250,000							Kecamatan Banjarwangi	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			200 Orang	14,600,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		200 Orang	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi
7	01	05	02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			200 Orang	15,650,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		200 Orang	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12 Dokumen	100,000,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		12 Dokumen	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					83,262,094							Kecamatan Banjarwangi	

7	01	06	2.02		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						83,262,094							Kecamatan Banjarwangi	
7	01	6	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	26,462,094	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		3 Dokumen	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Dokumen	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	11,800,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		4 Dokumen	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Garut, Caringin, Purbayani	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Dokumen	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banjarwangi
TOTAL											3,215,814,138							3,530,959,482	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Banjarwangi sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81	81,5	82	82,5	83	81,75		81,5	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	-	70	75	80	-		-	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			-	-	90	95	100	-		-	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	CC	B	B	BB	CC		CC	

sumber : hasil pengolahan data Kecamatan Banjarwangi

penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarwangi ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Banjarwangi serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Banjarwangi (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah

dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.Kecamatan Banjarwangi.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Banjarwangi sebesar Rp.2.916.518.856-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Banjarwangi diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Banjarwangi mengusulkan 6 (enam) Program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Banjarwangi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Banjarwangi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Kepmen 050/5889)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
												Target 2023	Target kepmen 050	Pagu Indikatif	Pagu (Direcrah)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																		Nasional	Daerah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN									2,916,518,856									5,690,437,712	Kec. Banjarwangi	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan			%	100	%	100		2,916,518,856		Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya	Kecamatan	100	2,916,518,856		Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja			%	12	%	12		12,300,000		Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		12	16,000,000		Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	1	%	1	2 Dokumen (Renja Mumi, Renja Perubahan)		2,650,000	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		1	12,500,000		Kec. Banjarwangi	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen (RKA Mumi)		2,500,000								2,625,000	Kec. Banjarwangi	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen (RKA Perubahan)		2,500,000								2,625,000	Kec. Banjarwangi	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen (DPA Mumi)		2,500,000								2,625,000	Kec. Banjarwangi	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen (DPA Perubahan)		2,500,000								2,625,000	Kec. Banjarwangi	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					2 Dokumen (DPA Perubahan)		2,500,000								2,625,000	Kec. Banjarwangi	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan (Triwulanan)		2,500,000								2,625,000	Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan			%	12	%	12				Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		12				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	%	12	%	12	Orang/bulan (16 PNS/12 Bulan)	1,586,668,856		Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		12	1,586,668,856		Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	1	%	1	1 Dokumen (LRA,NERACA,LUPE LO dan Calk)	13,530,000		Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		1				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawalan di Kecamatan			%	12	%	12				Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		12				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	%	24	%	24	bh	12,607,500	12,607,500	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		25	13,237,875		Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	5	%	5	bh	15,000,000	15,000,000	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		5	15,750,000		Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			%	12	%	12				Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		12				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	%	9	%	9	1 Paket	6,858,170	6,858,170	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		10	7,201,075		Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	%	1	%	1	1 Paket	35,000,000	35,000,000	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		50	25,000,000		Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	%	1	%	1	1 Paket	15,000,000	15,000,000	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		15	15,750,000		Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	%	12	%	12	12 Paket	13,913,130	13,913,130	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		15	14,608,785		Kec. Banjarwangi	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	%	12	%	12	12 Paket	10,419,420	10,419,420	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		60	10,940,380		Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	%	12	%	12	Laporan	22,352,000	22,352,000	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		1250	23,469,600		Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	12	%	12	Laporan	36,000,000	36,000,000	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		600				
7	01	01	2.06		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	%	1	%	1	Dokumen	10,000,000	10,000,000								10,500,000	Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			%	12	%	12				Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		12				
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	%	3	%	3	2 Unit			Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		3				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	%	2	%	2	8 bh	20,160,000	20,160,000								21,168,000	Kec. Banjarwangi	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	12	%	12				Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		12				

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	%	12	%	12	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		12	15,000,000	Kec. Banjarwangi
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SesuaiKebutuhan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	%	12	%	12	3 org	18,000,000	18,000,000	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		12	15,000,000	Kec. Banjarwangi
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	12	%	12				Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		12		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	%	8	%	8	8 Unit	4,000,000	4,000,000	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		10	5,542,260	Kec. Banjarwangi
7	01	01	2.09	08	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	%	1	%	1	8 Unit	75,000,000	75,000,000	Kab. Garut	DAU	Tidak	Ya		1	69,000,000	Kec. Banjarwangi

Sumber : Dari Pengolahan Data Kecamatan Banjarwangi

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Banjarwangi melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Banjarwangi mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Table 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banjarwangi

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
1	Mulyajaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	Meningkatkan Prodiktifitas sektor pertanian	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Mulyajaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan LPM, RT, RW	Meningkatakan SDM Dan Tupoksi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Mulyajaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Keselamatan Pengguna Jalan	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	Mulyajaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan bagi Korban Bencana atau Relokasi	Terputusnya Jalan Lingkungan Akibat Bencana	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	Mulyajaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Kader Dasawisma	Meningkatkan SDM Kader	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Mulyajaya	Pertanian	Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Domba Garut dan Unggas)	Meningkatkan ekonomi Masyarakat Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Mulyajaya	Pendidikan	Pengadaan APE dalam – PAUD	Melengkapi Saranaprasana PAUD	Dinas Pendidikan
8	Mulyajaya	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bantuan Perkuatan Modal Usaha Perempuan	Meningkatkan usaha UMKM Kelompok Perempuan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
9	Mulyajaya	Kesehatan	Peralatan Posyandu (Paket)	Kurangnya Peralatan di tiap POSYANDU	Dinas Kesehatan
10	Mulyajaya	Tenaga Kerja	Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK) (HOK)	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
11	Mulyajaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Tembok Penahan Tanah Permukiman untuk Hunian Kawasan Strategis	Meningkatkan Keselamatan warga Masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman

12	Mulyajaya	Pendidikan	Pengadaan Laptop - PNF/Kesetaraan	Perlengkapan Sarana Prsarana PKK	Dinas Pendidikan
13	Mulyajaya	Pertanian	Jalan Usaha Tani	Meningkatkan Perekonomian Petani	Dinas Pertanian

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
14	Mulyajaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) --> Septic Tank Komunal dan MCK untuk Permukiman Kumuh	Kesehatan	Dinas Perumahan dan Permukiman
15	Mulyajaya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	perbaikan Saluran irigasi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16	Mulyajaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Sarana Keagamaan untuk Hunian Kawasan Strategis	Memperbaiki sarana Keagamaan	Dinas Perumahan dan Permukiman
17	Mulyajaya	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Sarpras Poskamling	Meningkatkan Keamanan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
18	Mulyajaya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
19	Mulyajaya	Kepemudaan dan Olahraga	Penataan Lapang Olahraga Sekolah	kelayakan sarana olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
20	Mulyajaya	Pariwisata	Desa Wisata	Perkembangan lokasi wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21	Mulyajaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kelayakan tempat tinggal	Dinas Perumahan dan Permukiman
22	Mulyajaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bimtek Aparatur Desa	Meningkatkan SDM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

23	Tanjungjaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R Skala Permukiman untuk Cegah Kumuh	adanya penumpukan sampah di masing-masing wilayah RW 04,05,08	Dinas Perumahan dan Permukiman
24	Tanjungjaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	untuk Pencegahan Banjir	Dinas Perumahan dan Permukiman
25	Tanjungjaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Untuk mencegah terjadinya longsor	Dinas Perumahan dan Permukiman
26	Tanjungjaya	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat	Untuk Menambah Pengetahuan tata cara penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Tanjungjaya	Sosial	Pelatihan Pemberdayaan Penyandang Cacat Disabilitas	Untuk memberikan Edukasi Pada Masyarakat Tentang Disabilitas	Dinas Sosial

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
28	Tanjungjaya	Kearsipan	Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan	Untuk Meningkatkan Pengetahuan Perangkat Desa Tentang Kearsipan Administrasi Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	Tanjungjaya	Kesehatan	Peralatan Posyandu (Paket)	Untuk Penunjang Sarana dan Prasarana Posyandu	Dinas Kesehatan
30	Tanjungjaya	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Pakaian Linmas	Untuk Menunjang Kinerja dan Meningkatkan Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja
31	Tanjungjaya	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Lapang Volly	Untuk Menunjang sarana dan prasarana olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
32	Tanjungjaya	Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Sarana Olahraga Lainnya (Kaos, Matras, Sandsack, Barbel)	Untuk Memenuhi sarana dan prasarana olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
33	Tanjungjaya	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Sarpras Poskamling	Untuk Menunjang pengadaan poskamling	Satuan Polisi Pamong Praja

34	Tanjungjaya	Pendidikan	Pengadaan Mebeuler – PAUD	penunjang sarana dan prasarana untuk PAUD	Dinas Pendidikan
35	Tanjungjaya	Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Alat dan Sarana Olahraga Tradisional	Untuk menunjang sarana dan prasarana olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
36	Tanjungjaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Untuk Penunjang Sarana & Prasarana Transportasi Bagi Masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman
37	Tanjungjaya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Air Bersih Untuk Masyarakat di Wilayah RW 03	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
38	Tanjungjaya	Perindustrian	Bantuan Mesin IKM (Agro/Non Agro) - Industri Pengolahan Gula Aren	Untuk Meningkatkan IKM di Wilayah Desa Tanjungjaya	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
39	Tanjungjaya	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bantuan Perkuatan Modal Usaha Perempuan	,Meningkatkan Perekonomian Perempuan Desa	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
40	Tanjungjaya	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas – SD	Untuk Penunjang Saran dan Prasarana Pendidikan	Dinas Pendidikan
41	Tanjungjaya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan Kabupaten	terkendalanya jalan yang sangat tidak layak pakai di karenakan keadaan tanah.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Desa	Urusan	Usulan	permasalahan	OPD Tujuan
42	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Memperbaiki Pasilitas Sarna Olahraga Sepak Bola	Dinas Perumahan dan Permukiman
43	Dangiang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Jalan Kabupaten	Memperlacarkan Akses Jln Penyambung Antra Dua Desa Dangiang dan Desa Girimukti, Keadaan Anjlok Akibat Derasnya Air Hujan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

44	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Meperbaiki Akses Jln Desa Pencegahan Longsornya Tanah	Dinas Perumahan dan Permukiman
45	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Pembukaan Jaln Lingkungan Untuk Mempercepat Akses Perekonomian Masyarakat Kami	Dinas Perumahan dan Permukiman
46	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Hunian Kawasan Strategis	Perbaiki /Pelebaran	Dinas Perumahan dan Permukiman
47	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	Amblok Akibat Pergeseran Tanah	Dinas Perumahan dan Permukiman
48	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) --> Septic Tank Komunal dan MCK untuk Permukiman Kumuh	Kurangnya Air Bersih	Dinas Perumahan dan Permukiman
49	Dangiang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Meperbaiki Akses Mengalirnya Air	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
50	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman
51	Dangiang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Jalan Kabupaten	Kp. Cidangiang RT01RW01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
52	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Hunian Kawasan Strategis	Pelebaran Jln Antra Dua Kampung	Dinas Perumahan dan Permukiman
53	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Memperkuat/Penceganan Anjlok Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Permukiman
54	Dangiang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Perbaikan Saluran Air	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

55	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Permukiman Kumuh	Pencegahan Untuk Anjloknya Tanah Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan dan Permukiman
----	----------	---	---	---	--------------------------------

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
56	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Untuk Kenyamn Warga Mecega Pergerakan Tanah Guyuran Derasnya Air	Dinas Perumahan dan Permukiman
57	Dangiang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan Kabupaten	Peyambung Antra Dua Kampung Ambles Akibat Derasnya Air Hujan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
58	Dangiang	Pertanian	Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Domba Garut dan Unggas)	Untuk Pemodalan Usaha Awal Ternah Domba Per Kelompok	Dinas Perikanan dan Peternakan
59	Dangiang	Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Pertanian (Pangan, Horti dan Perkebunan)	Untuk Memajukan Perekonomian Masyarakat	Dinas Pertanian
60	Dangiang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi (Perbaikan) Embung dan Penampungan Air Untuk Pertanian	Untuk Meningkatkan Pertanian Ekonomi Masayrakat	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
61	Dangiang	Pertanian	Jalan Usaha Tani	Untuk Mepermudahkn Jalur Mata Penciahrian Petani	Dinas Pertanian
62	Dangiang	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Gedung Posyandu	Penambhan Kekurangn Tempat Posyandu Tulip 1, 2, 4, dan Tulip 6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
63	Dangiang	Perhubungan	Penyediaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	Untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Desa	Dinas Perhubungan
64	Dangiang	Kesehatan	Peralatan Posyandu (Paket)	Untuk Pelengkapan Kesehatn	Dinas Kesehatan
65	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh	Meningkatakn Akses Kenyamn Peribadahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
66	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Sarana Keagamaan untuk Permukiman Kumuh	Untuk Perbaikan Akses Peribadahan Masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman

67	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh	Untuk Meningkatkan Kenyamanan Kases Pribadahan Masayarkat, Mesjid Jami-Baiturrohim	Dinas Perumahan dan Permukiman
68	Dangiang	Lingkungan Hidup	Pengadaan Komposter	Untuk Penmbahan Alat Pelaynan Pemerintahan Desa	Dinas Lingkungan Hidup
69	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Untuk Meningkatkan Akses Perekonomian Masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman
70	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	Untuk Berbaikakan Dan Pelebaran Jalan	Dinas Perumahan dan Permukiman
71	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Hunian Kawasan Strategis	Untuk Meningkatkan Dan Keamnan Roda Dua	Dinas Perumahan dan Permukiman
72	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Untuk Keyamnan Dan Keselamatan Roda Dua	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
73	Dangiang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Air Bersih Keadaan Jarak Jauh	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
74	Dangiang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan Jalan Kabupaten	Perbaikan Jembatan Ambruk Akibat Derasnya Air Hujan, Penyambung Antra Dua Desa Dangiang dan Desa Girimukti,	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
75	Dangiang	Pertanian	Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Domba Garut dan Unggas)	Membutuhkan Modal usaha ternak Domba	Dinas Perikanan dan Peternakan
76	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sarana Keagamaan untuk Permukiman Kumuh	Keadaan Tempat Sarna Peribadahan Sudah sangat Tua Dan Keadaan Sudah Roboh	Dinas Perumahan dan Permukiman
77	Dangiang	Pendidikan	Pembangunan Perpustakaan – SMP	Membutuh kn sarna tempat membaca anak didik	Dinas Pendidikan

78	Dangiang	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Keadaan Tanah Anjlok Keadaan Sangat Rawan	Dinas Perumahan dan Permukiman
79	Bojong			Keterbatasan Srana Dan Prasana PAUD Di Desa Bojong, Ikut Menghambat Proses Belajar Siswa	
80	Bojong			Tembok Penahan Tanah Di wilayah Kp. Bantarpeundeuy Rt.03/Rw.04 Desa Bojong belum tersedia, sehingga rawan longsor dan membahayakan pemukiman warga setempat, dengan insentitas curah hujan yang tinggi maka akan semakin menggrus badan jalan lingkungan yang merupakan akses satu-satunya di wilayah tersebut	
81	Bojong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaiki Tembok Penahan Tanah untuk Permukiman Kumuh	Pemukiman warga yang berada di wilayah desa bojong rawan longsor dengan belum terbangunnya sarana tembok penahan tanah yang berada di wilayah desa bojong, dengan intensitas curah hujan yang lebat sangat rawan terancam bencana longsor bagi warga setempat, maka dari itu perlu adanya pembangunan tembok penahan tanah	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
----	-----------	--------	--------	--------------	------------

82	Bojong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	Kp. Pasirkondang Rt.04 Rw.04 Desa Bojong memerlukan sarana transportasi yang memadai demi kelancaran perekonomian warga setempat serta akses transportasi yang bersifat mendesak seperti kebutuhan berobat ke Rs/Poliklinik setempat maupun untuk kebutuhan sehari-hari,	Dinas Perumahan dan Permukiman
83	Bojong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	warga Kp. Cidulang Rt.03 Rw.05 - Leles Rt.02 Rw.06 desa bojong memerlukan jalan lintas desa untuk menghubungkan jalan desa bojong dengan desa talagajaya, dengan fasilitas jalan yang ada tidak memungkinkan warga untuk menggunakan akses jalan tersebut, untuk itu perlu adanya perbaikan jalan yang menghubungkan antara desa bojong dan desa talagajaya	Dinas Perumahan dan Permukiman
84	Bojong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Permukiman Kumuh	Drainase dari limbah pabrik tahu sangat mengganggu pemukiman warga yang terlewati oleh saluran limbah pabrik tersebut, termasuk lahan pertanian warga ikut terganggu dengan adanya limbah pabrik yang tidak teratur.	Dinas Perumahan dan Permukiman
85	Bojong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	ketika intensitas curah hujan tinggi Pembuangan air dari Lapangan bola milik desa sangat deras sehingga air sering membahayakan warga yang terlewati oleh pembuangan air tersebut.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

86	Bojong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Akses transportasi di wilayah Kp. Bantarpeundeuy rt.03 Rw,04 Sangat terkendala dengan adanya Jalan Lingkungan yang tidak layak pakai, dengan kebutuhan warga setempat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk keperluan perekonomian dan kebutuhan mendesak lainnya seperti berobat dan keperluan sehari-hari lainnya	Dinas Perumahan dan Permukiman
87	Bojong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Akses transportasi di wilayah Kp. Cileles rt.02 Rw,07 Sangat terkendala dengan adanya Jalan Lingkungan yang tidak layak pakai, dengan kebutuhan warga setempat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk keperluan perekonomian dan kebutuhan mendesak lainnya seperti berobat dan keperluan sehari-hari lainnya	Dinas Perumahan dan Permukiman
88	Bojong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Akses transportasi di wilayah Kp. Cadasgantung Rt.05 Rw.04 Sangat terkendala dengan adanya Jalan Lingkungan yang tidak layak pakai, dengan kebutuhan warga setempat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk keperluan perekonomian dan kebutuhan mendesak lainnya seperti berobat dan keperluan sehari-hari lainnya	Dinas Perumahan dan Permukiman

89	Bojong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Hunian Kawasan Strategis	Jalan poros desa yang menghubungkan desa bojong - desa jayabakti perlu di rehab berat dikarenakan kondisi jalan sangat mengawatirkan dan membahayakan pengguna jalan.	Dinas Perumahan dan Permukiman
90	Bojong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Permukiman Kumuh	Jalan yang menghubungkan desa bojong - jayabakti telah di perbaiki sehingga perlu adanya saluran air atau drainase dan TPT dari Kp. Bojong Rt.02 Rw.02 - Kp. Barukawung Rt.02 Rw.01 untuk menjaga kualitas jalan agar terawat dan menjaga jalan dari urugan tanah yang berada di sepanjang jalan.	Dinas Perumahan dan Permukiman
91	Bojong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan Kabupaten	Jalan yang menghubungkan antara desa bojong kecamatan Banjarwangi ke desa Cipangramatan Kecamatan Cikajang diperlukan perhatian khusus, pasalnya jalan tersebut merupakan akses alternatif antar kecamatan yang sangat efektif dalam mengurai kemacetan dan efektivitas jarak tempuh serta waktu perjalanan warga yang hendak melakukan perjalanan ke luar kecamatan, serta mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi warga.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
92	Bojong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) --> Septic Tank Komunal dan MCK untuk Permukiman Kumuh	MCK di wilayah Kp. Cikokong Rt.04 Rw.01 belum tersedia sehingga warga setempat memerlukan MCK yang memenuhi standard kesehatan dan kebersihan.	Dinas Perumahan dan Permukiman

93	Bojong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bendung Irigasi (DI Kewenangan Kabupaten di Bawah 1.000 Ha)	Ketersediaan air di wilayah desa bojong cenderung kurang apalagi saat musim panas tiba, debit air untuk keperluan warga serta kebutuhan pertanian sangat kurang dan memprihatinkan, maka Leuwi Panoongan sangat potensial untuk menjawab kebutuhan warga yang kekurangan air bersih.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
94	Bojong	Sosial	Pelatihan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Pemberdayaan wanita di wilayah desa bojong untuk meningkatkan perkonomian warga, serta wilayah desa bojong terhitung sangat potensial untuk memproduksi hasil bumi dan diolah untuk dipasarkan ke luar wilayah, salahsatunya gula semut, perlu adanya dorongan serta dukungan permodalan dan pelatihan bagi warga.	Dinas Sosial
95	Bojong	Lingkungan Hidup	Penghijauan Lahan Kritis	salahsatu potensi Desa Bojong adalah lahan perkebunan yang luas, akan tetapi pohon yang bersifat non komersil/tanaman jangka panjang sangat jarang sekali ditemukan dikarenakan ketersediaan bibit pohon di wilayah desa sangat langka, maka dari itu untuk upaya reboisasi/penghijauan di wilayah desa perlu adanya pengadaan bibit pohon non komersil/ bibit pohon jangka panjang	Dinas Lingkungan Hidup

96	Bojong	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana Perikanan Budidaya	Potensi desa bojong selain lahan pertanian adalah lahan pesawahan sangat potensial bagi warga untuk membudidayakan ikan di sawah/empang masing-masing maka perlu ada dorongan/dukungan dari pemerintah setempat untuk meningkatkan perekonomian warga di sektor budidaya ikan nila khususnya.	Dinas Perikanan dan Peternakan
----	--------	------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
97	Kadongdong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Akses Jalan Menuju Rumah Penduduk Rusak	Dinas Perumahan dan Permukiman
98	Kadongdong	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Gedung Posyandu	Kekurangan Bangunan Posyandu sehingga aktifitas sementara menggunakan rumah warga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
99	Kadongdong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Sering terjadi luapan air akibat tidak adanya drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
100	Kadongdong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Longsor yang mengakibatkan akses jalan menuju perkampungan putus	Dinas Perumahan dan Permukiman
101	Kadongdong	Kesehatan	Pembangunan Pustu	Akses Menuju Puskesmas Jauh. sehingga diperlukan pustu untuk melakukan tindakan medis dalam kondisi darurat	Dinas Kesehatan
102	Kadongdong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh	Kondis bangunan yang rusak berat diakibatkan usia yang sudah lama	Dinas Perumahan dan Permukiman

103	Kadongdong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) --> Septic Tank Komunal dan MCK untuk Permukiman Kumuh	Belum tersedianya MCK sehingga masih menggunakan jamban umum untuk kegiatan mandi cuci kaktus	Dinas Perumahan dan Permukiman
104	Kadongdong	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan/Rehab Jembatan	Jembatan yang ada masih menggunakan bambu dan sangat membahayakan terhadap pengguna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
105	Kadongdong	Pendidikan	Pembangunan RKB – PAUD	Belum tersedianya gedung belajar untuk kegiatan KBM anak usia dini	Dinas Pendidikan
106	Kadongdong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Petani sawah sulit mendapatka air untuk memelihara tanaman pertaniannya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
107	Kadongdong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Akses jalan menuju pemukiman penduduk rusak dan berlumpur	Dinas Perumahan dan Permukiman
108	Kadongdong	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Lapang Volly	Belum tersedinya pasilitas olah raga yang mayoritas olah raga utamanya volly ball	Dinas Pemuda dan Olah Raga
109	Kadongdong	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Lapang Volly	Belum tersedinya pasilitas olah raga yang mayoritas olahranya volly ball	Dinas Pemuda dan Olah Raga
110	Kadongdong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	ketidak mampuan pemilik rumah untuk merehabilitasi rumahnnya dikarena jompo dan status ekonominya tidak mampu	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
111	Kadongdong	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Kader Pos Yandu	Masih Kurangnya Pengetahuan sebahagian kader pos yandu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
112	Kadongdong	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Kader Dasawisma	Masih kurangnya pengetahuan sebahagian kader dasawisma	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

113	Kadongdong	Kesehatan	Peralatan Posyandu (Paket)	Kekurangan peralatan untuk menunjang kegiatan pos yandu	Dinas Kesehatan
114	Kadongdong	Sekretariat Daerah	Bantuan Guru Ngaji	Kurangnya kesejahteraan Guru Ngaji yang ada di desa kadongdong	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
115	Kadongdong	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Masih belum tertibnya administrasi desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
116	Kadongdong	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Hunian Kawasan Strategis	Jalan utama rusak berat sehingga akses roda 4 dan dua sulit untuk melintas	Dinas Perumahan dan Permukiman
117	Padahurip	Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas – SD	Rusak Berat	Dinas Pendidikan
118	Padahurip	Pendidikan	Pembangunan Perpustakaan – SD	Belum memiliki Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
119	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Permukiman untuk Hunian Kawasan Strategis	rawan bencana	Dinas Perumahan dan Permukiman
120	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Hunian Kawasan Strategis	Belum ada penerangan jalan umum	Dinas Perumahan dan Permukiman
121	Padahurip	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Belum tersedia Perangkat Computer dan akses internet	Dinas Komunikasi dan Informatika
122	Padahurip	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bimtek Perencanaan untuk Desa	belum Tersedianya Ahli Khusus Proses Perencanaan Desa Yang lebih baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
123	Padahurip	Kesehatan	Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	SDM masyarakat masih sangat rendah terhadap pengetahuan sanitasi lingkungan	Dinas Kesehatan
124	Padahurip	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat	Masyarakat belum mengetahui mitigasi kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

125	Padahurip	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan (Orang)	para pelaku usaha belum mengetahui teknik berwirausaha	Dinas Pemuda dan Olah Raga
126	Padahurip	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan LPM, RT, RW	Masih banyak lembaga desa yang perlu peningkatan kapasitas dalam tugasnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

N	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
127	Padahurip	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Aset Desa	Penataan administrasi Desa Perlu Peningkatan pengetahuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
128	Padahurip	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Linmas Desa	Meningkatkan Kualitas Linmas	Satuan Polisi Pamong Praja
129	Padahurip	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bimtek Aparatur Desa	Para Aparatur Desa masih sangat terbatas dalam pengetahuannya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
130	Padahurip	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembentukan/Pemekaran Desa	Luas Wilayah yang luas dan Jumlah Penduduk yang sudah banyak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
131	Padahurip	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Tugu Batas Desa	Belum ada tugu Batas Desa dengan desa tetangga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
132	Padahurip	Perdagangan	Pasar Desa	Belum ada pasar Desa, sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
133	Padahurip	Pariwisata	Desa Wisata	PAD Desa Masih sangat rendah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
134	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	Meminimalisir lingkungan kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
135	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Mencegah Pemukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
136	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Mencegah Pemukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman

137	Padahurip	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan/Rehab Jembatan	Tidak ada akses transportasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
138	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh	tidak ada sarana keagamaan	Dinas Perumahan dan Permukiman
139	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) --> Septic Tank Komunal dan MCK untuk Permukiman Kumuh	Belum Tersedianya Sanitasi yang Baik di lingkungan masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman
140	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) --> Septic Tank Komunal dan MCK untuk Permukiman Kumuh	Belum Tersedianya Sanitasi yang Baik di lingkungan masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
141	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) --> Septic Tank Komunal dan MCK untuk Permukiman Kumuh	Belum Tersedianya Sanitasi yang Baik di lingkungan masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman
142	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) --> Septic Tank Komunal dan MCK untuk Permukiman Kumuh	Belum Tersedianya Sanitasi yang Baik di lingkungan masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman

143	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) --> Septic Tank Komunal dan MCK untuk Permukiman Kumuh	Belum Tersedianya Sanitasi yang Baik di lingkungan masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman
144	Padahurip	Pertanian	Jalan Usaha Tani	Belum ada akses transportasi untuk mengangkut hasil pertanian	Dinas Pertanian
145	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) --> Septic Tank Komunal dan MCK untuk Permukiman Kumuh	Belum Tersedianya Sanitasi yang Baik di lingkungan masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman
146	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	belum dapat di lalui secara normal	Dinas Perumahan dan Permukiman
147	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	RUSAK BERAT	Dinas Perumahan dan Permukiman
148	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	SANGAT RUSAK BERAT UNTUK AKSES	Dinas Perumahan dan Permukiman
149	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	TIDAK BISA DI LALUI SECARA NORMAL	Dinas Perumahan dan Permukiman
150	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	LONGSOR	Dinas Perumahan dan Permukiman
151	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Ruang Terbuka Non Hijau/Ruang terbuka Publik untuk Permukiman Kumuh	RAWAN LONGSOR	Dinas Perumahan dan Permukiman
152	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau/Ruang terbuka Publik untuk Cegah Kumuh	SUSAH MENDAPAT KAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
----	-----------	--------	--------	--------------	------------

153	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	KESUSAHAAN UNTUK MENGAIRI PESAWAHAN	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
154	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	KESUSAHAAN UNTUK MENGAIRI PESAWAHAN	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
155	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Kabupaten Menuju Standar	SUPAYA BISA DI LEWATI KENDARAAN SECARA NORMAL	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
156	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	karena kekurangan air bersih	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
157	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan jalan lingkungan untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
158	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan jalan lingkungan untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
159	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	rawan longsor	Dinas Perumahan dan Permukiman
160	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan jalan lingkungan untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
161	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Tembok Penahan Tanah untuk Permukiman Kumuh	dibtuuhkan pembangunan tembok penahan tanah untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman

162	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan tembok penahan tanah untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
-----	-----------	---	--	---	--------------------------------

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
163	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan tembok penahan tanah untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
164	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan tembok penahan tanah untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
165	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan tembok penahan tanah untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
166	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan tembok penahan tanah untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
167	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Lahan pertanian mengalami kekeringan atau kekurangan air untuk keberlanjutan penanaman.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

168	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Lahan pertanian mengalami kekeringan atau kekurangan air untuk keberlanjutan penanaman.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
169	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	"Dibutuhkan tanggul sungai sub DAS Untuk mengtasi persoalan banjir dan kemungkinan terjadinya longsor yang dapat mengancam permukiman."	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
170	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	"Dibutuhkan tanggul sungai sub DAS Untuk mengtasi persoalan banjir dan kemungkinan terjadinya longsor yang dapat mengancam permukiman."	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
171	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	"Dibutuhkan tanggul sungai sub DAS Untuk mengtasi persoalan banjir dan kemungkinan terjadinya longsor yang dapat mengancam permukiman."	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
172	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	"Dibutuhkan tanggul sungai sub DAS Untuk mengtasi persoalan banjir dan kemungkinan terjadinya longsor yang dapat mengancam permukiman."	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
173	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS	"Dibutuhkan tanggul sungai sub DAS Untuk mengtasi persoalan banjir dan kemungkinan terjadinya longsor yang dapat mengancam permukiman."	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
174	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Embung dan Penampung Air Untuk Pertanian	Lahan pertanian mengalami kekeringan atau kekurangan air untuk keberlanjutan penanaman.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
175	Padahurip	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Lahan pertanian mengalami kekeringan atau kekurangan air untuk keberlanjutan penanaman.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

176	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan jalan lingkungan untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
177	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan jalan lingkungan untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
178	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Hunian Kawasan Strategis	belum memiliki TPU atau sarana TPU yang ada dalam kondisi tidak tertata.	Dinas Perumahan dan Permukiman
179	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Hunian Kawasan Strategis	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
180	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Hunian Kawasan Strategis	belum memiliki TPU atau sarana TPU yang ada dalam kondisi tidak tertata.	Dinas Perumahan dan Permukiman
181	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	RAWAN LONGSOR	Dinas Perumahan dan Permukiman
182	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Permukiman untuk Hunian Kawasan Strategis	dibtuuhkan pembangunan tembok penahan tanah untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
183	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan tembok penahan tanah untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
184	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan tembok penahan tanah untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
185	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan tembok penahan tanah untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
186	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	dibtuuhkan pembangunan tembok penahan tanah untuk menunjang kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman/lingkungan hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman
187	Padahurip	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Sarana Keagamaan untuk Hunian Kawasan Strategis	belum memiliki sarana keagamaan beserta sarana pendukungnya dalam menunjang kegiatan keagamaan masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman
188	Padahurip	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bantuan Modal Bumdes	Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
189	Padahurip	Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Pertanian (Pangan, Horti dan Perkebunan)	Terbatasnya kemampaun Kelompok dalam penyediaan sarana produksi, Pemakaian pupuk yang belum sesuai dengan rekomendasi	Dinas Pertanian
190	Padahurip	Pertanian	Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Domba Garut dan Unggas)	Bantuan Kelompok sarana perikanan budidaya	Dinas Perikanan dan Peternakan

191	Padahurip	Kesehatan	Rehabilitasi Pustu	masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
192	Padahurip	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Gedung Posyandu	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat(UKBM)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
193	Padahurip	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Sarpras Poskamling	Kurangnya sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Linmas	Satuan Polisi Pamong Praja
194	Padahurip	Sekretariat Daerah	Bantuan Guru Ngaji	upaya meningkatkan kesejahteraan Guru ngaji	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut

No	Nama Desa	Urusan	Usulan	Permasalahan	OPD Tujuan
195	Talagajaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh	terjadi luapan air ke jalan jalan diwaktu hujan yang mengakibatkan genangan air dan lumpur di jalan dan pemukiman yang disebabkan tidak adanya atau tidak berfungsi optimalnya saluran drainase.	Dinas Perumahan dan Permukiman
196	Talagajaya	Lingkungan Hidup	Penyediaan Mesin Pengolah Sampah	belum memiliki sarana Pengeolahan sampah 3R Skala Permukiman sehingga kondisi kesehatan lingkungan kurang baik.	Dinas Lingkungan Hidup
197	Talagajaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Desa Talagajaya merupakan desa yang memiliki kontur tanah yang labil sehingga sering terjadi longsor. hal ini mengakibatkan cepat rusaknya jalan.	Dinas Perumahan dan Permukiman
198	Talagajaya	Pendidikan	Pembangunan Perpustakaan – SD	Menurunnya minat baca para siswa, sehingga perlu diadakan pembangunan perpustakaan di SDN 1 dan SDN 2 Talagajaya	Dinas Pendidikan

199	Talagajaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh	Minimnya jalan lingkungan yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lain, sehingga akan menyulitkan transportasi warga. untuk itu diperlukan adanya pembangunan jalan lingkungan di Desa Talagajaya	Dinas Perumahan dan Permukiman
200	Talagajaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk Hunian Kawasan Strategis	Tempat pemakaman umum di Kp. Sindangsari masih belum tertata dengan rapih, belum memiliki penerangan, dan belum memiliki benteng, sehingga TPU jadi terkesan angker.	Dinas Perumahan dan Permukiman
201	Talagajaya	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Pakaian Linmas	Kebanyakan Linmas di Talagajaya belum memiliki kelengkapan seragam.	Satuan Polisi Pamong Praja
202	Talagajaya	Pendidikan	Pembangunan Jamban – PAUD	PAUD DI Desa Talagajaya belum memiliki Jamban yang memadai.	Dinas Pendidikan
203	Talagajaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan/Rehab Jembatan	sarana akses jembatan kecil di Kp. Sindangsari belum memadai karena masih menggunakan bambu, sehingga membutuhkan pembangunan jembatan yang lebih permanen.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber : RPTK Kecamatan dan Desa

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Kecamatan Banjarwangi dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahana Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahana Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;

3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Banjarwangi mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan BANJARWANGI
Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	90%
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	90%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	CC

Sumber : Hasil pengolahan data kecamatan Banjarwangi.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Banjarwangi merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Banjarwangi sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Banjarwangi diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Banjarwangi merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya.

Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs.

Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Banjarwangi diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Banjarwangi. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal.

Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Banjarwangi diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Banjarwangi sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut.

Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Banjarwangi melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Banjarwangi sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Banjarwangi dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 2.916.518.856,-.

Adapun Program Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan 2.916.518.856,- pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Pengadaan Mebel
 - 1.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

tabel. 2.7
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju tahun 2024
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banjarwangi

lembar 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Sebelum Perubahan Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Urusan Wajib								
07:01	Bidang Urusan Pemerintahan								
07:01:23	Kecamatan Banjarwangi				609.551.832				953.300.000
7.01.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Banjarwangi	100%	134.080.300	DAU		100%	210.700.000
7.01.23.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	Kecamatan Banjarwangi	12 Bulan	13.200.000	DAU		12 Bulan	14.000.000
7.01.23.01.006	penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pembayaran STNK	Kecamatan Banjarwangi	- 1 Unit - 6 Unit	2.440.000	DAU		- 1 Unit - 6 Unit	2.500.000
7.01.23.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Banjarwangi	- 4 ob -15 Jenis	7.768.000	DAU		- 6 ob -15 Jenis	15.400.000
7.01.23.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang memadai	Kecamatan Banjarwangi	- 5 Unit - 5 Unit	5.050.000	DAU		-	6.800.000
7.01.23.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Banjarwangi	- 56 Jenis - 500 Buah	25.780.300	DAU		- 79 Jenis - 500 Buah	28.600.000

7.01.23.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Banjarwangi	- 48 Paket - 13.000 Lbr	6.549.400	DAU		- 54 Paket - 13.000 Lbr	7.500.000
7.01.23.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	Kecamatan Banjarwangi	- 5 Jenis	7.149.500	DAU		- 11 Jenis	8.500.000
7.01.23.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Kecamatan Banjarwangi	- 23 item	0	DAU		-	34.000.000
7.01.23.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai	Kecamatan Banjarwangi	- 1 item	0			-	12.000.000
7.01.23.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	Kecamatan Banjarwangi	4 exemplar x 12 Bulan	0	DAU		-	1.400.000
7.01.23.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	Kecamatan Banjarwangi	- 495 Dus - 495 Dus	27.200.000	DAU		- 600 Dus - 600 Dus	33.000.000
7.01.23.01.021	Rapat-rapat Pembinaan ke dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa/kelurahan	Kecamatan Banjarwangi	120 kali	43.400.000	DAU		120 kali	47.000.000
7.01.23.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100%	269.363.200			100%	403.800.000
7.01.23.02.005	Pengadaan kendaraan 2 dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	Kecamatan Banjarwangi	-	72.000.000	DAU		1 Unit	83.000.000
7.01.23.02.010	Pengadaan Meubeulair	Jumlah Meubeulair yang memadai	Kecamatan Banjarwangi	- 10 Buah - 50 Buah	48.783.200	DAU		- 14 Buah - 50 Buah	52.000.000
7.01.23.02.014	Pengadaan Alat-alat Keamanan	Jumlah perlengkapan keamanan yang memadai	Kecamatan Banjarwangi	-	0	DAU		-	4.000.000
7.01.23.02.022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang memadai	Kecamatan Banjarwangi	-	0	DAU		1 Unit	50.000.000

7.01.23.02.024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah gedung Kantor yang memadai	Kecamatan Banjarwangi	- 1 Unit - 6 Unit	14.615.000	DAU		- 1 Unit - 6 Unit	15.800.000
7.01.23.02.041	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	Kecamatan Banjarwangi	- 1 Unit	0	DAU		-	-
7.01.23.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Website Yang Memadai	Kecamatan Banjarwangi	- 1 Gedung	0	DAU		- 1 Gedung	100.000.000
7.01.23.02.167	Penyediaan Website Dinas	Jumlah website yang memadai	Kecamatan Banjarwangi	-	-	DAU		-	17.000.000
7.01.23.02.179	Pengadaan Aplikasi/Papan Visual Elektronik	Jumlah Sarana Arsip Yang Memadai	Kecamatan Banjarwangi	1 Paket	0	DAU		1 Paket	12.000.000
7.01.23.02.276	Pengadaan Sistem Informasi Arsip Surat (SIAS)	Jumlah Sarana Arsip Yang Memadai	Kecamatan Banjarwangi	-	-	DAU		-	10.000.000
7.01.23.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	15.000.000			100%	25.300.000
7.01.23.05.101	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas Yang Memadai	Kecamatan Banjarwangi	-	-	DAU		22 stel	10.800.000
7.01.23.05.101	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri Yang Memadai	Kecamatan Banjarwangi	-	-	DAU		22 stel	4.800.000
7.01.23.05.101	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga Yang Memadai	Kecamatan Banjarwangi	-	-	DAU		22 stel	4.800.000
7.01.23.05.101	Pengadaan Pakaian Adat	Jumlah Pakaian Adat Yang Memadai	Kecamatan Banjarwangi	-	-	DAU		22 stel	4.800.000
7.01.23.11	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Kecamatan Banjarwangi	-	0	DAU		100%	25.000.000

7.01.23.11.001	Pelaporan Keuangan	Jumlah Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD	Kecamatan Banjarwangi	-	0	DAU		12 Bulan	12.500.000
7.01.23.11.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kecamatan Banjarwangi	-	0	DAU		- 3 orang - 12 Dok - 3.600 Lbr	12.500.000
7.01.23.82	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Prosentase Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan Banjarwangi	100%	152.398.582			100%	196.500.000
7.01.23.82.004	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Trantibum	Kecamatan Banjarwangi	-3 Kali - 24 OH	9.325.000	DAU		-4 Kali - 31 OH	13.000.000
7.01.23.82.009	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan desa di tingkat kecamatan	Kecamatan Banjarwangi	-100 OP	9.325.000	DAU		-120 OP	13.000.000
7.01.23.82.019	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Pencapaian Target PBB	Kecamatan Banjarwangi	-3 OB -1 Kegiatan -48 OH	7.555.000	DAU		-4 OB -1 Kegiatan -48 OH	14.000.000
7.01.23.82.049	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	Jumlah kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Banjarwangi	- 175 OP - 1 buah - 4 Dok - 2.000 Lbr - 175 OP - 115 OP	10.670.000	DAU		- 191 OP - 1 buah - 4 Dok - 5.000 Lbr - 175 OP - 175 OP	12.500.000
7.01.23.82.073	Pelatihan PASKIBRAKA	Jumlah Kegiatan Paskibraka	Kecamatan Banjarwangi	-	-	DAU		1 Kegiatan	10.000.000
7.01.23.82.086	Kegiatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Aktifitas Keagamaan	Kecamatan Banjarwangi	1 Kegiatan	0	DAU		1 Kegiatan	30.000.000
7.01.23.82.088	Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKOPIMCAM)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi forkopimcam	Kecamatan Banjarwangi	-120 OP	9.325.000	DAU		-160 OP	12.000.000
7.01.23.82.130	Monitoring BPNT	Jumlah Monitoring Penyaluran BPNT	Kecamatan Banjarwangi	3 Kali	7.725.000	DAU		4 Kali	12.420.000
7.01.23.82.132	Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Kegiatan dan Dokumen RPTK	Kecamatan Banjarwangi	- 1 Dok - 4 OK	22.870.000	DAU		- 1 Dok - 4 OK	24.000.000

7.01.23.82.134	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	Kecamatan Banjarnwangi	- 150 orang	0	DAU		-	-
7.01.23.82.136	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	Jumlah pelaksanaan razia tingkat kecamatan	Kecamatan Banjarnwangi	3 Kali	8.760.300	DAU		4 Kali	12.000.000
7.01.23.82.144.	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Jumlah pelaksanaan hari-hari besar Nasional dan Upacara/acara lainnya	Kecamatan Banjarnwangi	- 3 Kali	6.925.000	DAU		- 4 Kali	16.800.000
7.01.23.83	Program Penyelenggaraan Administrasi Terpadu (PATEN)	Prosentase Penyelenggaraan PATEN yang sesuai Dengan Standar Pelayanan	Kecamatan Banjarnwangi	100%	53.709.750			100%	92.000.000
7.01.23.83.002.	Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Jenis Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Banjarnwangi	-12 buah	43.209.700	DAU		100%	54.000.000
7.01.23.83.004.	LAPHALI (Pelayanan Pada Hari Libur)	Jumlah Pelayanan Pada Hari Libur	Kecamatan Banjarnwangi	4 Orang	10.500.000	DAU		90%	13.000.000
7.01.23.83.007.	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah pengembangan pelayanan publik	Kecamatan Banjarnwangi	1 Aplikasi	0	DAU		90%	25.800.000
					2.916.518.856				.3953.300.000

Sumber dari. Sistem SIPD dan Pengolahan data dari Rencana Kerja Kecamatan Banjarnwangi

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Banjarwangi Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut sebesar Rp. 2.319.820.991,- (Dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta d delapan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus sembilna puluh satu), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang
Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan
Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.741.961.491,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum
Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja
Predikat CC

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 7.828.400,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (cc)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.403.666.591,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (cc)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (cc)

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 125.468.800,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan

2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan

3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan

4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan

5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa

6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan

7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat CC

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.515.249.300,

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan

2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (CC)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 58.405.886,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan

2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan

3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (CC)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 35.505.030,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (CC)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 136.875.400,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 132.159.480,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan,

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (cukup Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.715.920,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.800.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.800.000,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 174.248.800,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 155.849.100,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.399.700,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 259.640.700,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 259.640.700,-

Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 57.999.090,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Banjarwangi

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 57.999.090,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

3. Jumlah Dokumen RPTK

4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Rencana Kerja tahun 2023 bisa di lihat pada tabel. 2.8 sebagai berikut :

TABEL. 2.8
RENCANA KERJA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	SumberDana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN				2,257,620,391	62,200,600	0	0	2,319,820,991	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,679,760,891	62,200,600	0	0	1,741,961,491	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7,828,400	0	0	0	7,828,400	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7,828,400	0	0	0	7,828,400	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,403,666,591	0	0	0	1,403,666,591	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,394,703,991	0	0	0	1,394,703,991	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,962,600	0	0	0	8,962,600	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15,000,000	0	0	0	15,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	0	0	0	15,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				107,968,800	17,500,000	0	0	125,468,800	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,940,000	0	0	0	6,940,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56,123,300	0	0	0	56,123,300	

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			1,352,500	17,500,000	0	0	18,852,500	
Kode					Uraian	SumberDana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operas i	Belanj a Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			6,430,000	0	0	0	6,430,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			4,068,000	0	0	0	4,068,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			23,155,000	0	0	0	23,155,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			9,900,000	0	0	0	9,900,000	

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				299,400	44,700,600	0	0	45,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			299,400	44,700,600	0	0	45,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36,047,700	0	0	0	36,047,700	
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,947,700	0	0	0	10,947,700	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7,100,000	0	0	0	7,100,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18,000,000	0	0	0	18,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108,950,000	0	0	0	108,950,000	

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			3,200,000	0	0	0	3,200,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			105,750,000	0	0	0	105,750,000	
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				171,212,500	0	0	0	171,212,500	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				103,238,500	0	0	0	103,238,500	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			13,238,500	0	0	0	13,238,500	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			90,000,000	0	0	0	90,000,000	

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				67,974,000	0	0	0	67,974,000	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			67,974,000	0	0	0	67,974,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				15,000,000	0	0	0	15,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15,000,000	0	0	0	15,000,000	
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15,000,000	0	0	0	15,000,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				197,000,000	0	0	0	197,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				132,000,000	0	0	0	132,000,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			132,000,000	0	0	0	132,000,000	

7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15,000,000	0	0	0	15,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Banjarwangi ,Semua Kelurahan		15,000,000	0	0	0	15,000,000	
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50,000,000	0	0	0	50,000,000	
Kode					Uraian	SumberDana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operas i	Belanj a Modal	Belanja Tidak Terdug a	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	0	0	0	50,000,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM				165,000,000	0	0	0	165,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah				165,000,000	0	0	0	165,000,000	

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15,000,000	0	0	0	15,000,000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Banjarwangi)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150,000,000	0	0	0	150,000,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				29,647,000	0	0	0	29,647,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				29,647,000	0	0	0	29,647,000	

7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	0	0	0	15,000,000	
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	0	0	0	10,000,000	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Kecamatan Banjarwangi)	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum	Kab. Garut, Banjarwangi, Banjarwangi		4,647,000	0	0	0	4,647,000	
SUMBER : Sistem SIPD-Penetapan Ranthir														

Sumber dari SIPD

BAB V

P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Banjarwangi mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Banjarwangi menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Banjarwangi melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN